

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan.

Tabel VI.1.

Strategi dari Tujuan, dan Sasaran berdasar Misi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	1. Mewujudkan aparatur yang bersih, cerdas beretos kerja tinggi dan professional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal	1. Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	1.1.1. Menetapkan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor serta mengefektifkan implementasi standar-standar tersebut
		2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel	1.1.2. Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan informasi publik antara pemerintah dan publik yang aksesibel bagi semua kelompok untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya publik
		3. Diwujudkannnya pelayanan publik cepat, transparan, dan adil	1.1.3. Menetapkan dan Menerapkan standar pelayanan minimal atau standar prosedur yang jelas dan terbuka bagi calon pengguna layanan
		4. Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai <i>good governance</i> (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan publik	1.1.4. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik publik secara transparan dengan menggunakan tehnologi informasi dan media informasi lain yang kontekstual sehingga

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			memudahkan pengawasan publik
		5. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1.5. Mengefektifkan forum stakeholder secara berkala untuk meningkatkan ketepatan isu pembangunan
	2. Mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar	1. Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)	1.2.1. Penyediaan informasi perencanaan, dan penganggaran secara transparan dan aksesibel sebagai informasi publik sehingga memfasilitasi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas Dewan pada publik
		2. Meningkatnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	1.2.2. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik publik secara transparan dengan menggunakan teknologi informasi dan media informasi lain yang kontekstual sehingga memudahkan pengawasan publik
		3. Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	
2	1. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan	1. Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.	2.1.1. Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan
		2. Meningkatkan pengelolaan asset-aset daerah.	
		3. Meningkatkan kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al:	2.1.2. Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, efisiensi belanja, maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>kerjasama pemerintah dan swasta (KPS/<i>Public Private Partnership</i> (PPP), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan donasi/zakat).</p> <p>4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.</p> <p>5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal investasi.</p> <p>6. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi</p> <p>7. Meningkatkan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah</p> <p>8. Membangun kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.</p>	
	2. Menumbuhkan kembangkan kegiatan-kegiatan peningkatan perekonomian perkotaan yang didasarkan pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan.	1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota	2.2.1.Pembangunan sarana prasarana kota berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk difabel
		<p>2. Terwujudnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (<i>Payment for Ecological/environment services</i> : imbal jasa lingkungan)</p> <p>3. Terwujudnya identifikasi investasi swasta</p>	2.2.2.Menciptakan kondisi penyediaan data daerah dan layanan perijinan yang pro investasi
	3. Membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat	1. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat	2.3.1.Penyediaan akses informasi ketenagakerjaan yang aksesibel oleh semua kelompok masyarakat pencari kerja

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota 2. Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja 3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 	2.3.2. Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan 3. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja 4. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja 	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja. 2. Terciptanya wirausaha baru 	2.3.4. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat penyelenggara pendidikan ketrampilan/kecakapan hidup untuk menciptakan peluang usaha ekonomi mandiri
3	1. Mengembangkan daya saing sektor riil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha). 2. Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan 3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang 4. Meningkatnya kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan 	3.1.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran
	2. Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya 	3.2.1. Penyediaan kebutuhan pangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat,

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 	
	3. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha. 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi 3. Semakin meluasnya pangsa pasar UMKM 4. Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha. 5. Bertambahnya volume fasilitas kredit yang bisa diakses UMKM 	3.3.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
	4. Terwujudnya pengembangan agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas 2. Meningkatnya jenis usaha agribisnis 3. Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran 4. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis. 	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agribisnis
	5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan) 2. Meningkatnya produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet 	3.5.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan
	6. Meningkatkan kualitas dan estetika	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan 	3.6.1. Pengembangan kerjasama dengan kelompok masyarakat dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	lingkungan perkotaan dengan mengoptimalkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	sawah untuk agribisnis tanaman pangan 2. Terciptanya kampung hortikultura di tiap kelurahan	swasta untuk membudayakan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di tiap kelurahan
	7. Menyusun strategi peningkatan SDM petani untuk bercocok tanam lebih baik	1. Teridentifikasinya kondisi social ekonomi petani Kota Magelang 2. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru 3. Menurunnya serangan OPT 4. Tersedianya benih/bibit berkualitas. 5. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan 6. Tersusunnya strategi peningkatan kualitas SDM pertanian tanaman pangan	3.7.1. Mengoptimalkan pembinaan kelompok petani untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian
	8. Terwujudnya perlindungan hutan	1. Meningkatnya perlindungan hutan	3.8.1. Menegakkan regulasi (hukum) atas pengelolaan hutan ilegal dan memasyarakatkan penanaman hutan kembali
4	1. Mewujudkan Sarana dan Prasarana/ infrastruktur Perkotaan yang memadai	1. Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL	4.1.1. Penyusunan dokumen dan Penegakan hukum implementasi RTRW
		1. Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan 2. Pengembangan Infrastruktur perumahan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis 5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat 6. Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi	4.1.2. Pembangunan sarana prasarana kota (infrastruktur perumahan, transportasi, informasi) berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk diffabel

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		masyarakat yang berkelanjutan	
	2. penggalian dan pemeliharaan potensi kebudayaan serta peningkatan pengelolaan keragaman budaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan 2. Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya. 3. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya. 4. Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 4.2.1. Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan pariwisata 4.2.2. Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah
	3. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pembangunan yang berdasar kemandirian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2. Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat 3. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat 4. Terlaksananya review pokjandal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi 5. Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis 6. Meningkatnya kualitas program PNPM 7. Terlaksananya PMTAS 8. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 	4.3.1. Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan
5.	1. Menyejahterakan masyarakat perkotaan dengan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan sehingga menjadi masyarakat yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan 3. Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya gizi masyarakat 5. Berkurangnya kasus 	5.1.1. Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> penyakit menular 6. Berkurangnya kasus penyakit tidak menular 7. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 8. Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat 9. Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan 10. Meningkatnya kemandirian masarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 11. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat 12. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera 	
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial 	5.1.2. Mendesain model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/organisasi masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). 2. Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar 3. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah 4. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal 5. Meningkatnya 	5.1.3. Penyediaan layanan pendidikan umum, vokasional, maupun pendidikan khusus yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus</p> <p>6. Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>7. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>8. Meningkatnya minat baca masyarakat</p> <p>9. Meningkatnyawawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan</p>	
		<p>1. Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah</p> <p>2. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu</p>	5.1.4. Membangun kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk mengelola potensi pemuda dan olah raga
6	1. Menanamkan rasa kebangsaan pada masyarakat Kota Magelang sehingga muncul rasa bangga terhadap Bangsa Indonesia	<p>1. Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat</p> <p>2. Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah</p> <p>3. Meningkatnya pembinaan politik daerah</p> <p>4. Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP</p>	6.1.1. Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan
	2. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME	1. Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.	6.2.1. Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar menghidupi ajaran agama dan tidak melakukan tindak kekerasan
	3. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat	<p>1. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas,</p>	6.3.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, tidak melakukan tindak kekerasan serta sadar dan tanggap bencana

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		SAR, satpol PP 3. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana	

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan antara lain:

1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional, dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Merujuk pada tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan, maka arah kebijakan pembangunan daerah Kota Magelang 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	1.1.1. Menetapkan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor serta mengefektifkan implementasi standar-standar tersebut	1.1.1.1. Penyusunan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor 1.1.1.2. Menegakkan kontrol dan pengendalian manajemen kantor sesuai standar
	1.1.2. Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan informasi publik antara pemerintah dan publik yang aksesibel bagi semua	1.1.2.1. Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kelompok untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya publik	1.1.2.2. Membangun sistem pengaduan publik yang aksesibel oleh publik
	1.1.3. Menetapkan dan Menerapkan standar pelayanan minimal atau standar prosedur yang jelas dan terbuka bagi calon pengguna layanan	1.1.3.1. Penetapan regulasi yang mengatur kewajiban tiap SKPD memiliki Standar prosedur pelayanan dan target standar pelayanan minimal atau standar lainnya sesuai regulasi yang berlaku
	1.1.4. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan dengan menggunakan teknologi informasi dan media informasi lain yang kontekstual sehingga memudahkan pengawasan publik	1.1.4.1. Penegakan sistem reward and punishment sesuai regulasi yang berlaku 1.1.4.2. Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik 1.1.4.3. Membangun sistem pengaduan publik yang aksesibel oleh publik
	1.1.5. Mengefektifkan forum stakeholder secara berkala untuk meningkatkan ketepatan isu pembangunan	1.1.5.1. Setiap SKPD atau gabungan diwajibkan memiliki forum dialog dengan stakeholders untuk merumuskan isu-isu pembangunan
	1.2.1. Penyediaan informasi perencanaan, dan penganggaran secara transparan dan aksesibel sebagai informasi publik sehingga memfasilitasi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas Dewan pada publik	1.2.1.1. Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu 1.2.1.2. Menyediakan publikasi sebagai informasi publik atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
	1.2.2. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan dengan menggunakan teknologi informasi dan media informasi lain yang kontekstual sehingga memudahkan pengawasan publik	1.2.2.1. Penegakan sistem reward and punishment sesuai regulasi yang berlaku 1.2.2.2. Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik 1.2.2.3. Membangun sistem pengaduan publik yang

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		aksesibel oleh publik
2.	2.1.1.Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	2.1.1.1. Review regulasi daerah yang menghambat peningkatan kapasitas dan efisiensi keuangan daerah 2.1.1.2. Penegakan reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
	2.1.2.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, efisiensi belanja, maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi	2.1.2.1. Optimalisasi penggunaan aset daerah yang belum dikelola optimal 2.1.2.2. Pengendalian efisiensi belanja melalui perencanaan sesuai Standar Belanja Umum berdasar regulasi yang berlaku 2.1.2.3. Menyusun rencana aksi pengembangan investasi pemerintah dan swasta untuk pengelolaan potensi daerah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah
	2.1.3.Pembangunan sarana prasarana kota berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk difabel	2.1.3.1. Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok difabel
	2.2.2.Menciptakan iklim pro investasi	2.2.2.1. Penyediaan data daerah dan layanan perijinan yang pro investasi
	2.3.1.Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas informasi peluang kerja	2.3.1.1. Penyediaan akses informasi ketenagakerjaan yang aksesibel oleh semua kelompok masyarakat pencari kerja
	2.3.2. Memperkuat kerja sama dengan	2.3.2.1. Fasilitasi pelatihan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dunia usaha dan industri untuk akses magang dan pelatihan kerja	ketrampilan kerja dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial
	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	2.3.3.1. Penguatan Pengawasan penerapan hukum perlindungan tenaga kerja
	2.3.4. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat penyelenggara pendidikan ketrampilan/kecakapan hidup untuk menciptakan peluang usaha ekonomi mandiri	2.3.4.1. Memberi insentif penyelenggara kayanan ketrampilan life skill 2.3.4.2. Mendorong pembukaan jenis ketrampilan life skill lebih beragam
3.	3.1.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran	3.1.1.1. Analisis stakeholder organisasi/kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi 3.1.1.2. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat ekonomi untuk bersinergi dalam forum pengembangan ekonomi
	3.2.1. Penyediaan kebutuhan pangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat,	3.1.1.1. Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan pangan terutama bagi kelompok miskin
	3.3.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	3.3.1.1. Menambah stimulasi dan fasilitasi untuk peningkatan manajemen dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) ; 3.3.1.2. Menambah stimulasi dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri (termasuk peningkatan kualitas dan pemasaran produk serta kualitas SDM UKM);

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.3.1.3. Mengembangkan sarana dan layanan perdagangan
	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agri bisnis	3.4.1.1. Analisis potensi unggulan daerah untuk dikembangkan menjadi agrobisnis, 3.4.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan industri kreatif berbasis pertanian dan potensi lokal
	3.5.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan	3.5.1.1. Analisis potensi unggulan daerah untuk dikembangkan menjadi agro industri, 3.5.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan industri kreatif berbasis pertanian dan potensi lokal
	3.6.1. Pengembangan kerjasama dengan kelompok masyarakat dan swasta untuk membudayakan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura di tiap kelurahan	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan tanaman agri bisnis 3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan tanaman agri bisnis
	3.7.1. Mengoptimalkan pembinaan kelompok petani untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian	3.7.1.1. Meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok tani dan peningkatan kualitas muatan pelatihan
	3.8.1. Menegakkan regulasi (hukum) atas pengelolaan hutan ilegal dan memasyarakatkan penanaman hutan kembali	3.8.1.1. Memasyarakatkan sanksi penindakan pelanggaran pengelolaan hutan ilegal kepada publik secara luas 3.8.1.2. Memasyarakatkan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		upaya penanaman hutan kembali
4.	4.1.1. Penyusunan dokumen dan Penegakan hukum implementasi RTRW	4.1.1.1. Penggunaan dokumen tata ruang sebagai dasar pembangunan kewilayahan 4.1.1.2. Penegakan sanksi pelanggaran RTRW
	4.1.2. Pembangunan sarana prasarana kota (infrastruktur perumahan, transportasi, informasi) berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk diffabel	4.1.2.1. Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok diffabel
	4.2.1. Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan peninggalan purbakala serta pariwisata	4.2.1.1. Analisis stakeholder organisasi / kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni budaya 4.2.1.2. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat seni budaya untuk bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya daerah
	4.2.2. Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah	4.2. Menyusun kalender even pementasan ajang kreasi seni budaya daerah dan promosi warisan purbakala untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah
	4.3.1. Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	4.3.1.1. Analisis stakeholder organisasi / kelompok masyarakat berdasar profesi atau kewilayahan 4.3.1.3. Pengembangan model pemberdayaan perempuan

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>untuk partisipasi dalam pembangunan</p> <p>4.3.1.4. Peningkatan kualitas perempuan dan anak.</p>
5.	5.1.1. Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
	5.1.2. Mendesain model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/organisasi masyarakat	5.1.2.1. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan ekonomi kreatif; penanganan layanan sosial dasar), dan pembangunan fisik
	5.1.3. Penyediaan layanan pendidikan umum, vokasional, maupun pendidikan khusus yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	<p>5.1.3.1. Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan umum, kejuruan, maupun non formal</p> <p>5.1.3.2. Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin</p> <p>5.1.3.3. Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan</p> <p>5.1.3.4. Meningkatkan perluasan pendidikan dan ketrampilan; memperoleh dan</p>
	5.1.4. Membangun kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk mengelola potensi pemuda dan olah raga	<p>5.1.4.1. Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat yang bergerak di bidang olahraga</p> <p>5.1.4.2. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok</p>

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>masyarakat olahraga untuk bersinergi dalam forum pengembangan olahraga daerah</p> <p>5.1.4.2. Menyusun kalender event ajang laga olahraga daerah untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah</p>
6.	6.1.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan	<p>6.1.1.1. Memasyarakatkan pemahaman keseimbangan kewajiban dan hak warga negara kepada masyarakat</p> <p>6.1.1.2. Mengupayakan pemantapan stabilitas politik;</p> <p>6.1.1.3. Memasyarakatkan kesadaran politik masyarakat yang demokratis</p>
	6.2.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar menghidupi ajaran agama dan tidak melakukan tindak kekerasan	<p>6.2.1.1. Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat berbasis agama</p> <p>6.2.1.2. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat agama untuk berpartisipasi mencukupi kebutuhan sarana prasarana ibadahnya</p> <p>6.2.1.3. Menyusun kalender even ajang forum dialog atau persaudaran antar umat beragama atau jamboreantar umat beragama</p>
	6.3.1.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, tidak melakukan tindak kekerasan serta sadar dan tanggap bencana	<p>6.3.1.1. Menurunkan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;</p> <p>6.3.1.2. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin</p>

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>masyarakat terhadap hukum;</p> <p>6.3.1.3. Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tercermin dari menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;</p> <p>6.3.1.4. Melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), minuman keras, penyakit HIV/AIDS, dan penyakit seksual di kalangan pemuda;</p> <p>6.3.1.4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>6.3.1.5. Melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).</p>